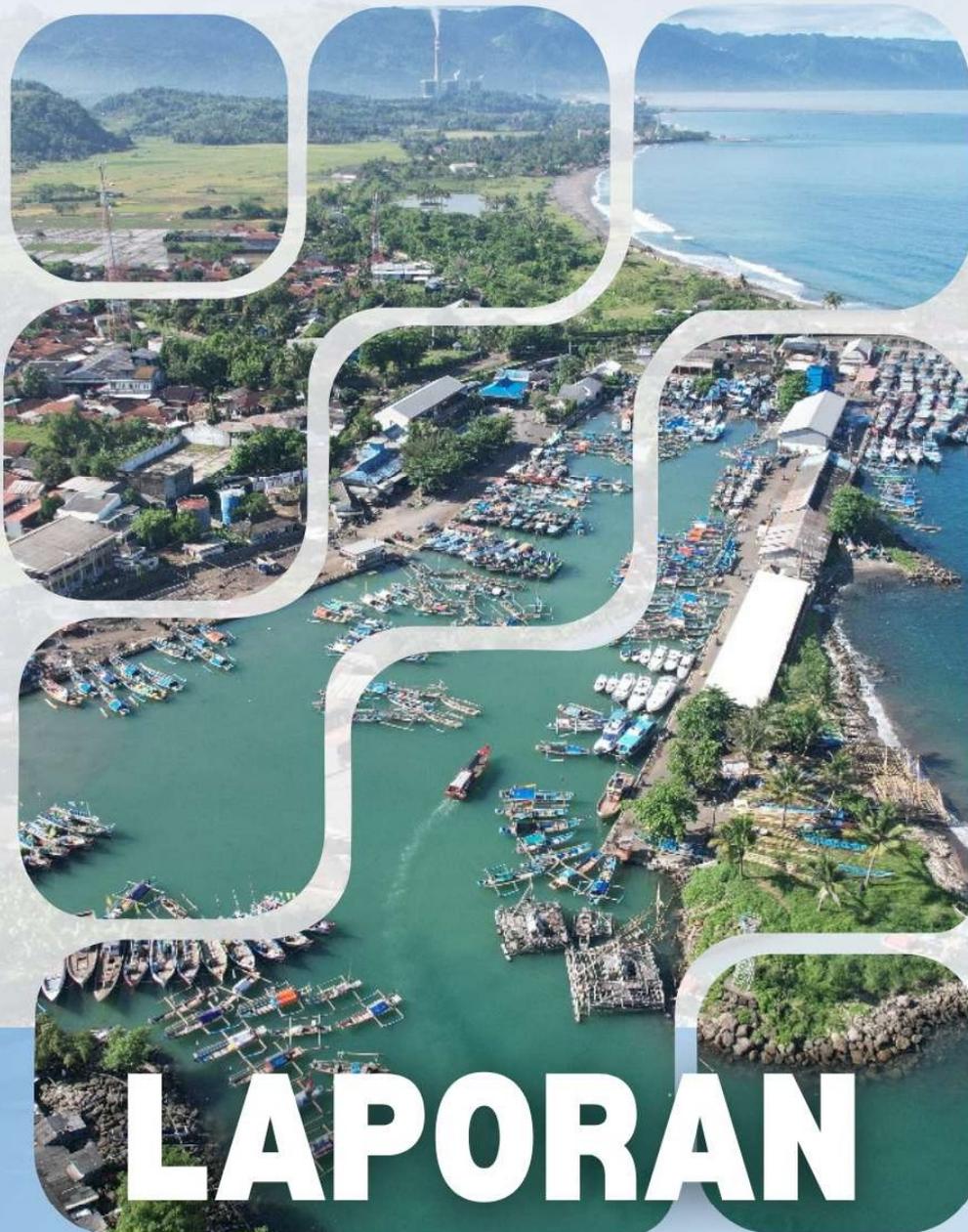


2025



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PALABUHANRATU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia – Nya Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPN Palabuhanratu kepada publik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKj PPN Palabuhanratu ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang dilaporkan secara bertahap. LKj PPN Palabuhanratu Triwulan I tahun 2025 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja tahun 2025.

Menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, untuk itu kritik dan saran dalam upaya penyempurnaan sangat kami harapkan agar laporan ini bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membantu dan turut serta dalam penyelesaian laporan ini semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua, Aamiin.

Palabuhanratu, 15 April 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu

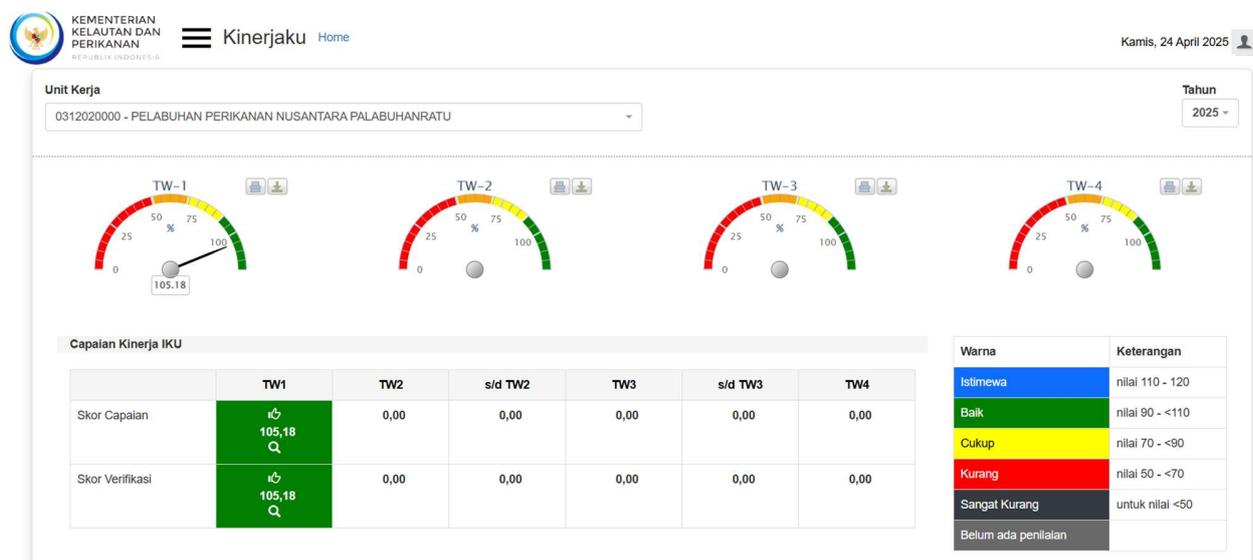


Sarwono, A.Pi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 14.833.174.000,-. Namun setelah adanya efisiensi, dukungan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.074.613.000,-. Dengan dukungan anggaran tersebut pada triwulan 1 tahun 2025 capaian pelaksanaan anggaran sebesar Rp. 5.204.611.380,- atau 43,10%. Secara kinerja, PPN Palabuhanratu mendapat Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 105,18%, sebagaimana terlihat pada *dashboard* dibawah ini:



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerjaku PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2025

Hal ini didukung oleh pencapaian 8 (delapan) indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Adapun rincian pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada triwulan 1 adalah sebagai berikut:

1. PNPB Non SDA di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta);

2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton);
3. Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai);
4. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai);
5. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal);
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu (Persen);
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen); dan
8. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Nilai).

Guna meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode selanjutnya. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama pimpinan dan pegawai lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu diharapkan dapat mendukung kinerja yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	1
1.3 Kedudukan.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi	3
1.5 Aspek Strategis.....	5
1.6 Sistematis Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis PPN Palabuhanratu 2021 – 2024	8
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.3 Target Kinerja dan Anggaran.....	10
2.4 Rencana Aksi Penetapan Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	14
SS 1 Nilai PNBK Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	16
SS 2 Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat.....	20
SS 3 Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing yang optimal dan bertanggung jawab.....	21
SS 4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Palabuhanratu ...	25
SS 5 Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu	33
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	35
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya.....	39
4.4 Rekomendasi Tindak Lanjut.....	39
LAMPIRAN DATA DUKUNG KINERJA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2025	10
Tabel 2.	Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025	11
Tabel 3.	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	12
Tabel 4.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2025	15
Tabel 5.	Capaian IKU "Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Palabuhanratu" Tahun 2025.....	17
Tabel 6.	Capaian IKU "Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2025	19
Tabel 7.	Capaian IKU "Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2025.....	22
Tabel 8.	Capaian IKU "Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2025	24
Tabel 9.	Capaian IKU " Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan" Triwulan I Tahun 2025	26
Tabel 10.	Capaian IKU " Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2025	28
Tabel 11.	Capaian IKU " Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu " Tahun 2025	31
Tabel 12.	Capaian Indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2025.....	35
Tabel 13.	Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Tahun 2025	36

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerjaku PPN Palabuhanratu Triwulan IV Tahun 2024 iii
- Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 5
- Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
Triwulan IV Tahun 2024 14
- Gambar 4. Grafik PNBP Bulanan dan Perbandingan PNBP pada tahun 2024 dengan tahun
2023 22
- Gambar 5. Grafik frekuensi trip kapal tiap bulan pada tahun 2024 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPN Palabuhanratu) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Lima kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan; (2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; (3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan (5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan kawasan terpilih sebagai basis atau sentra pengelolaan perikanan untuk pengembangan ekonomi usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan masyarakat, melalui penataan pusat pelayanan bisnis perikanan yang berfungsi melayani, mendorong, dan memacu pembangunan kawasan perikanan di wilayah Jawa Barat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada di Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatarbelakangi adanya potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) dan pada tanggal 18 Februari 1993 diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI.

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan) sebagai *mainstream* dari pembangunan kelautan dan perikanan mengingat wilayah laut/pantai dimana kegiatan perikanan berada merupakan sumberdaya anugerah potensial (*potential endowed resources*) yang khas memiliki keterkaitan (*intervedency*) yang kompleks dengan bidang sosial-perekonomian-budaya masyarakat disekitarnya. Kesiapan komponen infrastruktur/ fasilitas/ sarana penangkapan akan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan eksploitasi sumberdaya tersebut.

1.3 KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan Pelabuhan perikanan antara lain:

- Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

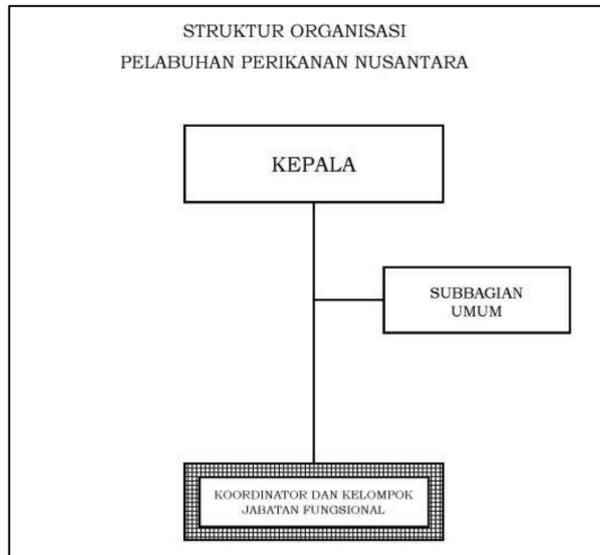
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang Pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;

- f. Pelaksanan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap terdiri dari:

- a. Subbagian Umum. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 2. *Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu*

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.5 ASPEK STRATEGIS

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- c. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, professional, dan berintegritas;

- d. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan
- e. Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel.

1.6 SISTEMATIK PENYAJIAN

Penyusunan LKj 2025 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang transparan dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang LKj yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini menguraikan secara singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/ Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Renja) dan Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan pembahasan IKU sesuai dengan *Balanced Score Card* (BSC). Memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis

akuntabilitas kinerja, yang diuraikan secara sistematis serta membandingkan data kinerja, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga akuntabilitas keuangan yang menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/ tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategis pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 2025 – 2029

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/ Lembaga lain yang beraktifitas di dalam Pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/ harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja: Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
2. Sasaran kegiatan kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah **“Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat”**, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
3. Sasaran kegiatan ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Pelabuhan**

Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang optimal dan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.
4. Sasaran kegiatan keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
- a. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan;
 - b. Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan.
5. Sasaran kegiatan kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah **“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK);
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - g. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu;

- h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan (NKPA) Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
- i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah menetapkan target – target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merujuk pada IKU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target – target tersebut tertuang pada Perjanjian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2025 sebagai dengan tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. *Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2025*

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	1	Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Rp. Juta)	1.050,14
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Ton)	6.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	35
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	55
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	195
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,50
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara	88

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Palabuhanratu (Nilai)	
	13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	87
	14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	76
	15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	81
	16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	92
	17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	71,50
	18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	88,50

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 14.833.174.000,-.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	646.261.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.052.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.176.861.000
	JUMLAH	Rp. 14.833.174.000,-

2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target — target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan) terhadap pencapaian indikator *output* dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya — upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi penetapan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu	Pelayanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
		Sarana Penunjang Pengusahaan Pelabuhan
		Pelaksanaan Penataan Dokumen Pelayanan Pelabuhan Perikanan
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu	Sosialisasi Dan Monev Pengguna Jasa Di Pelabuhan Perikanan
		Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Pelabuhan
4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu	Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
		Publikasi Dan Promosi Pelabuhan Perikanan
		Bimtek Dan Pembinaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di Pelabuhan
		Operasional Inspeksi Pengendalian Mutu Di Pelabuhan Perikanan
		Pengumpulan dan verifikasi data logbook penangkapan ikan
		Surveillance ISO 9001:2015
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu	Tata Kelola Dan Operasional Kesyahbandaran
		Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kesyahbandaran dalam rangka mendukung pelaksanaan PNBP pasca produksi dan penangkapan ikan terukur
		Pengelolaan Dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Di Pelabuhan Perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu	Rehabilitasi Gedung Kantor
		Rehabilitasi Geung Arsip
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	Operasional K5 Di Pelabuhan
		Surveillance ISO 14001:2015
		Bulan Cinta Laut
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	Pelaksanaan Pemeriksaan kelaikan/pengukuran/pengujian/inspeksi kapal perikanan
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Awak Kapal Perikanan/Nelayan
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	Penguatan WBK Lingkup PPN Palabuhanratu

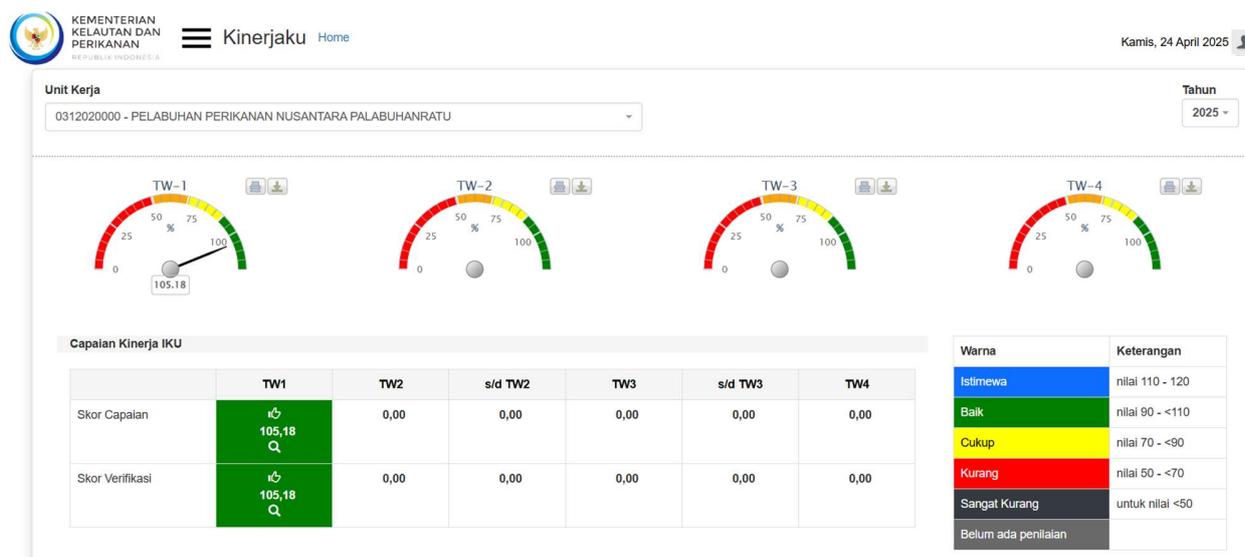
Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu	Implementasi PIPK dan SPIP Lingkup PPN Palabuhanratu
12	Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengelolaan Kinerja Lingkup PPN Palabuhanratu
13	IP ASN PPN Palabuhanratu	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dan Penerapan Disiplin Pegawai
		Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Langganan Daya dan Jasa
		Pelayanan Terkait Operasional Satker
		Langganan Jasa Lainnya
	Pengadaan Sarana Perkantoran	
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	Pemeliharaan Kantor
16	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu	Gaji dan Tunjangan
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu	Penyusunan Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu	Review Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) mendukung pembangunan perikanan melalui 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Metode pengukuran kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Hasil pengukuran kinerja kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan *dashboard* capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2024 seperti pada gambar 3.



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2025

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu memperoleh rata – rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2025 Triwulan I sebesar 105,18% dan

termasuk dalam kategori “Baik” (≥ 110). Adapun rincian pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I	Capaian TW I	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)	1.050,14	262,53	232,41	88,53
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	6.000	1.100	1176,77	106,98
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	100			
		4 Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	84	84	87,91	104.65
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	35			
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	55			
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	30,10	30,10	87,70	291.36
4	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	195	185	194	104,86
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26			
5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	10 Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,50			
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%)	85	85	100	117.65
		12 Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu (Nilai)	88			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW I	Capaian TW I	%
		13 Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu (Indeks)	87			
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu (%)	76	76	100	131,58
		15 Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu (%)	81			
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu (Nilai)	92			
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	71,50			
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks)	88,50	88,50	94,36	106,62

SS 1. Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu

Sasaran kegiatan - 1 “Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1 Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Palabuhanratu

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pungutan PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021 serta Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata

Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Adapun Jenis pelayanan jasa yang menghasilkan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meliputi: Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan; Jasa Pas Masuk Kendaraan; Jasa Coldstorage; Jasa Kebersihan; Pengadaan Air; Penggunaan Alat Berat; Jasa Perbengkelan; Jasa Penggunaan Lahan dan Bangunan; Pengadaan Es; Jasa Tempat Penumpukan Barang; Jasa Pemakaian mess; Jasa pemakaian ruang rapat; dan Pelayanan Listrik.

Tabel 5. Capaian IKU “Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Palabuhanratu” Tahun 2025

SS 1 Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Palabuhanratu												
IKU 1 Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2020	2021	2022	2023	2024	2025							
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025
231.64	211.07	324.07	-	486.13	1050.14	262.53	232.41	88.53	22.13	-52.19	1050.14	22.13
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025
456.42	405.85	718.78	-	920.07		525.07	-	0.00	0.00	-		0.00
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025
690.12	620.43	1,167.27	-	1,300.00		797.6	-	0.00	0.00	-		0.00
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025
876.43	945.50	1,666.23	1532.69	1,725.00		1050.14	-	0.00	0.00	-		0.00

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 232.412.231,- dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dicanangkan dalam perjanjian kinerja pelabuhan yaitu sebesar Rp. 262.536.250,- atau 22,13%. Capaian realisasi IKU 1 ini mencapai 88,53% dari target yang telah ditentukan namun jika dilakukan perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak triwulan I pada Tahun 2025 dengan Tahun 2024, pada triwulan I tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 52,19% atau Rp. 253.712.844,- dari penerimaan Rp. 486.125.075,- menjadi Rp. 232.412.231,-. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak dikarenakan beberapa hal sebagai berikut, antara lain:

1. Belum adanya realisasi penerimaan penggunaan/sewa tanah dan/atau bangunan,

sedangkan pada triwulan I tahun 2024 sudah ada penerimaan penggunaan tanah dan/atau bangunan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan mekanisme yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sesuai surat earan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.3521/DJPT.1/HK.410/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan perubahan peraturan tersebut akan mempengaruhi tidak adanya penerimaan dari sewa tanah, bangunan, biaya pemeliharaan dan jasa kebersihan Pelabuhan;

2. Banyak kapal yang tambat sebelum hari raya Idul Fitri dan belum sepenuhnya melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan yang mempengaruhi berkurangnya penerimaan jasa tambat kapal dan jasa mobil tanki air;
3. Berkurangnya pengunjung wisatawan yang masuk ke wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan pas masuk kendaraan golongan 1 (R2) dan kendaraan golongan III (R6) hal tersebut juga disebabkan oleh rusaknya fasilitas jalan dan jembatan akibat terjangan banjir beberapa waktu yang lalu;
4. Tidak adanya pendapatan jasa *Cool Room* sejak bulan September 2024 dikarenakan kondisi mesin yang rusak dan perlu adanya perbaikan, sedangkan untuk proses ABF belum ada penerimaan dikarenakan kerja mesin tidak ada pengguna yang melakukan proses ABF.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat tersebut, terdapat upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian PNBP yaitu melakukan penyewaan bangunan *cold storage* pada PT. Multi Samudera Fishindo serta telah melakukan pengajuan dan pengusulan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Nomor B.2884/PPN/PLT/KU.430/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 730/DJPT.1/PL.720/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara untuk proses persetujuan dari Kementerian keuangan. Jika dibandingkan dengan capaian penerimaan PNBP pada satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PNBP PPN Palabuhanratu adalah sebesar 63,36%.

SS 2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat

Sasaran kegiatan - 2 “Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator dengan jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun harian. Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan dengan pencatatan/pengumpulan data oleh petugas Enumerator. Data yang telah didapatkan kemudian diolah, diverifikasi, divalidasi untuk kemudian dilaporkan secara berkala.

Tabel 6. Capaian IKU “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2025

SS 2													
Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat													
IKU 2													
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu													
Realisasi					Target		Realisasi		%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
893.70	788.43	716.00	704.76	3,570.82	6000	1100	1,176.77	106.98	19.61	-67.04	6000	19.61	
						TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2			%TW 2 2025
2,666.70	2,237.00	1,577.78	1,730.94	5,678.50		2200		0.00	0.00				0.00
						TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3			%TW 3 2025
4445.9	3672	3147.08	4,388.00	9,369.00		4300		0.00	0.00				0.00
						TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4			%TW 4 2025
1,438.00	5,111.00	4,179.15	7,131.00	12278		6000		0.00	0.00				0.00

Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah melampaui target yang ditetapkan,

yaitu sebesar 1.100 Ton, dengan realisasi yaitu 1.176,77 Ton atau setara dengan 106,98% dari target. Meskipun demikian apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, terjadi penurunan volume produksi secara signifikan, yakni sebesar 67,04%. Pada Triwulan I Tahun 2024, produksi tercatat mencapai sekitar 3.571 ton, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025. Jumlah volume produksi perikanan tangkap tertinggi berada pada bulan Januari 2025 sebesar 515,97 Ton sedangkan yang terendah pada bulan Februari yaitu sebesar 267,54 Ton. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrem yang terjadi selama periode Januari hingga Maret 2025. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Pantai Selatan Sukabumi mengalami curah hujan bulanan di atas 400 mm, disertai gelombang laut tinggi yang sering melebihi 2,5–4 meter, terutama pada bulan Februari dan Maret. Kondisi ini sangat memengaruhi aktivitas operasional nelayan, terutama kapal-kapal kecil yang menjadi mayoritas armada di PPN Palabuhanratu. Akibatnya, banyak kapal tidak dapat melaut secara optimal karena risiko keselamatan yang tinggi, sehingga waktu dan frekuensi penangkapan menurun drastis. Selain itu, perubahan pola arus dan suhu permukaan laut turut memengaruhi keberadaan ikan di perairan sekitar, membuat hasil tangkapan lebih sulit diperoleh.

Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu sebesar 124,71% dari realisasi capaian PPN Prigi adalah 943,61 Ton.

Dari capaian yang telah didapatkan tersebut, terdapat juga faktor-faktor penghambat dalam mencapai target IKU 2 ini, antara lain:

1. Fasilitas kolam yang sudah dangkal dan terbatas menyebabkan kapal-kapal yang memiliki ukuran >100 GT tidak dapat masuk ke kolam dampak dari dangkalnya kolam dan ruang yang tidak mencukupi kapal untuk bermanuver masuk kedalam;
2. Terbatasnya jumlah petugas enumerator yang tidak sebanding dengan volume aktivitas pendaratan ikan menyebabkan kerap terjadi *data loos* dalam proses pencatatan hasil tangkapan.

SS 3. Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing

Sasaran Kegiatan - 3 “Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu, Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu, Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu, Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPN Palabuhanratu, dan Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu

Indikator ini menunjukkan persentase dari seluruh permohonan perusahaan yang telah dianalisis atau dievaluasi dengan jumlah permohonan perusahaan yang diajukan. IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.4 Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja ini merupakan tingkat capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan sesuai keputusan Dirjen Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini dihitung berdasarkan persentase rata – rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu melalui aplikasi PIPP. Perhitungan tersebut didasarkan pada tersediannya data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang meliputi pengumpulan laporan Inspeksi Pembongkaran Ikan, Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kegiatan K5, dan PNBP yang diinput pada aplikasi PIPP.

Tabel 7. Capaian IKU "Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2025

SS 3													
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing													
IKU 4													
Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu													
Realisasi					Target	Realisasi		%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2024	2025		%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu			
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
74.6	82.17	85.5	86.25	86.08	84	84	87.91	104.65	104.65	2.13	84	104.65	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
84	83	85.75	87.13	89.42		84		0.00	0.00	-		0.00	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
83.75	85.17	91.25	88.00	90.40		84		0.00	0.00	-		0.00	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
81.1	84.5	87.67	88.58	87.83		84		0.00	0.00			0.00	

Capaian IKU 4 pada Triwulan I Tahunn 2025 tercatat sebesar 87,91 yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 84, atau setara dengan 104,65% dari target. IKU 4 ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan periode yang sama yaitu sebesar 2,13% yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan maupun pengelolaan data. Peningkatan capaian ini terutama disebabkan oleh kelengkapan data penginputan serta ketepatan waktu pada saat penginputan yang menunjukkan meningkatnya kedisiplinan dan efisiensi kerja tim pelaksana. Namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa pada Triwulan selanjutnya diperkirakan akan terjadi penurunan realisasi capaian dikarenakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada pengurangan kegiatan sosialisasi atau bimtek yang selama ini berperan penting dalam menjaga kualitas pemahaman dan kapasitas SDM dalam pengelolaan data.

Perbandingan dengan satker lain yaitu PPN Prigi menunjukkan persentase capaian PPN Palabuhanratu tercatat sebesar 92,95% atau 87,91 dari capaian PPN Prigi yaitu sebesar 94,58.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru - penyesuaian Triwulan 4 yang menunjukkan

total dari Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan. Dalam pencapaian IKU ini didukung oleh 5 (lima) orang SDM, yang terdiri dari 4 orang petugas penerbitan persetujuan berlayar (PB) dan STBLKK dan 1 (satu) orang petugas penerbitan SHTI.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan tingkat pengembangan fasilitas PPN Palabuhanratu dibandingkan dengan masterplan PPN Palabuhanratu. Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. IKU ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan nilai pengendalian lingkungan yang didasarkan pada aplikasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan. Namun mulai dari Trwulan

III Tahun 2024 terdapat pembaruan aplikasi SELARASKAN menjadi SELARASKAN V2 yang mengakibatkan adanya perbedaan pada cara penginputan hasil kerja ke aplikasi SELARASKAN V2.

Tabel 8. Capaian IKU "Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2025

SS 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing													
IKU 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu													
Realisasi					Target		Realisasi		%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
-	-	-	-	90.65	30.1	30.1	87.70	291.36	291.36	-3.25	30.1	291.36	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
-	-	-	-	96.86		30.1		0.00	0.00	-		0.00	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
-	-	-	-	90.49		30.1		0.00	0.00	-		0.00	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
-	-	-	83.18	87.79		30.1		0.00	0.00	-		0.00	

Dari target capaian Triwulan I yaitu sebesar 30,10, pencapaian indikator nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan angka 87,70 atau realisasi capaian sebesar 291,36% dengan kategori “**Sangat Baik**”. Hal tersebut dapat dicapai karena beberapa faktor antara lain kesesuaian data hasil pengelolaan lingkungan yang diinput pada semua indikator program *mandatory* maupun program *voluntary* serta ketepatan waktu penginputan pada Web SELARASKAN. Tercapaiannya capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kesesuaian data hasil pengelolaan lingkungan yang diinput pada seluruh indikator baik dalam program *mandatory* maupun *voluntary*;
2. Ketepatan waktu penginputan data melalui platform web SELARASKAN, yang turut berkontribusi terhadap akurasi dan validitas data yang dilaporkan.

Meski demikian terjadi penurunan sebesar 3,25% dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa *loss* dalam

penginputan beberapa indikator penilaian yang kemungkinan besar terjadi karena kelalaian teknis atau kurangnya koordinasi antar petugas. Nilai terendah pada Triwulan I ini berada pada bulan Maret 2025 yaitu sebesar 80,56. Jika dibandingkan dengan capaian satuan kerja lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu adalah 103,92% dari realisasi capaian PPN Prigi sebesar 84,39. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai SELARASKAN yaitu melakukan evaluasi dengan petugas-petugas yang terlibat secara berkala dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan di PPN Palabuhanratu sehingga dapat diketahui identifikasi permasalahan yang terjadi selama dilaksanakannya pengendalian lingkungan, menjaga konsistensi dan akurasi penginputan data serta meningkatkan pemahaman petugas terhadap pentingnya pelaporan yang tepat waktu.

SS 4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan - 4 "Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu" memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan dan Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan yang berada di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan pelabuhan binaannya. Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. IKU ini merupakan IKU baru dengan pengukuran tahunan.

Tabel 9. Capaian IKU " Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan" Triwulan I Tahun 2025

SS 4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu												
IKU 8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan												
Realisasi					Target	Realisasi		%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2020	2021	2022	2023	2023	2025		%Capaian					
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025
		-	-	56	195	185	194	104.86	99.49	246.43	195	99.49
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025
		-	-	92		190		0.00	0.00	-		0.00
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025
		-	-	162		192		0.00	0.00	-		0.00
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025
		61	50	182.00	195		0.00	0.00	-	0.00		

Pada tahun ini IKU 8 memiliki capaian sebesar 194 Kapal dengan target capaian sebesar 185 Kapal yang berarti pada Triwulan I ini telah mencapai target yang ditentukan. Capaian ini meningkat sebanyak 264,43% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu sebesar 39,43%, dimana capaian IKU 8 PPN Prigi adalah 492 Kapal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Indikator ini merupakan salah satu ukuran kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan. Indikator ini penting dalam rangka memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan awak kapal perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tingkat pemenuhan dibagi dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :

1. Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
2. Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
3. Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
4. Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;

Pengukuran dilakukan dengan satuan nilai rata-rata dan bersifat kuantitatif dengan arah polaritas *maximizing* artinya semakin tinggi nilai yang dicapai maka semakin baik kinerjanya. Pada Tahun 225 ini target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 0,26. Pengukuran indikator ini yaitu semesteran.

SS 5. Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan - 5 “Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu” memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni (1) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu; (3) Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu; (4) IP ASN PPN Palabuhanratu; (5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu; (6) Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu; (7) Nilai IKPA PPN Palabuhanratu; (8) Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu; dan (9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saat ini capaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi salah satu IKU pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Indikator ini dinilai berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembangunan ZI menuju WBK pada komponen pengungkit, hasil dan reform yang dihitung secara tahunan. Nilai diperoleh dari hasil penilaian tim internal KKP. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam mempersiapkan penilaian PM pembangunan zona integritas antara

lain yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin mengenai pemenuhan kelengkapan dokumen pembangunan zona integritas WBK.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan penyelesaian atas temuan Inspektorat Jenderal II Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan berdasarkan audit yang dilakukan pada tahun 2025.

Tabel 10. *Capaian IKU " Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2025*

SS 5 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu													
IKU 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu													
Realisasi					Target		Realisasi		%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2020	2021	2022	2023	2024	2025			%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
-	-	-	-	100.00	85	85	100.00	117.65	117.65	0.00	85	117.65	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
-	-	-	-	100.00		85		0.00	0.00	-		0.00	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
-	-	-	-	80.00		85		0.00	0.00	-		0.00	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
-	-	-	100	100.00		85		0.00	0.00	-		0.00	

Sehubungan dengan tidak adanya revidi maupun audit dari pada PPN Palabuhanratu selama jangka waktu triwulan I atau bulan Januari hingga Maret 2025 maka capaian IKU 11 adalah sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 117,65%. Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Prigi capaian IKU 11 adalah sama. Perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya pada triwulan yang sama menunjukkan tidak adanya pertumbuhan dikarenakan capaian bernilai sama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.12 Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu

Indikator ini adalah indokator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas Implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%), nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP. Indikator ini merupakan indikator baru dengan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.13 IP ASN PPN Palabuhanratu

Indikator ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu :

- Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus- kursus, dan Seminar/ Workshop/ Magang/ Sejenis);
- Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata- rata kinerja individu pada suatu unit kerja;

- Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Berdasarkan hasil perhitungan keempat dimensi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tersebut, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
- Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung Tidak Profesional); dan
- Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (Sangat Tidak Profesional).

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan anggaran dan program kerja instansi. Untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi serta transparansi dalam pelaksanaannya, penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka menjadi suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Indikator ini mengukur sebesapa besar proporsi nilai pengadaan barang/jasa di PPN Palabuhanratu yang telah diumumkan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dibandingkan dengan total pagu pengadaan yang tersedia. RUP berfungsi sebagai perencanaan awal kegiatan pengadaan yang wajib diumumkan oleh setiap satuan kerja secara terbuka kepada publik dan pelaku usaha melalui platform SIRUP. Pengumuman RUP pada SIRUP bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang kegiatan pengadaan barang/jasa, yang mendukung pelaksanaan pengadaan secara transparan dan efisien, serta memperkuat pengawasan publik terhadap belanja pemerintah. Semakin tinggi persentase pengumuman RUP di SIRUP, semakin baik kualitas perencanaan pengadaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata Kelola yang baik (*good governance*) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya dalam Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021.

IKU ini merupakan iku baru yang baru ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 11. *Capaian IKU " Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu " Tahun 2025*

SS 5 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu												
IKU 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu (%)												
Realisasi					Target	Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2024	2025							
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025
-	-	-	-	0	76	76	100	131.58	131.58	-	76	131.58
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025
-	-	-	-	-		76		-	-	-		-
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025
-	-	-	-	-		76		-	-	-		-
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025
-	-	-	-	-		76		0.00	0.00	-		0.00

Capaian IKU 14 pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 100% atau realisasi sebesar 131,58% yang berarti telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 76%. Capaian ini diperoleh melalui capaian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang disampaikan melalui nota dinas nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 perihal Penyampaian hasil perhitungan capaian indikator kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2025 dari nota dinas tersebut ditunjukkan nilai PPN Palabuhanratu untuk IKU tersebut adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain yaitu PPN Prigi capaian PPN Palabuhanratu adalah sama yaitu 100%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.15 Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu

Indikator ini menggambarkan sejauh mana PPN Palabuhanratu melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan. Hal ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari

perencanaan kebutuhan, penetapan status penggunaan, penghapusan aset rusak berat, hingga penyusunan laporan pengelolaan BMN secara periodik. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
3. Tersediannya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.16 Nilai IKPA PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja. Dasar hukum penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator antara lain:

- Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif;
- Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian;

- Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin;
- Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani);
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor;
- Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
- Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM;
- Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran;
- Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan);
- Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran;
- Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan;
- Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00; dan
 - Kesalahan SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Indikator Kinerja Utama 5.17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu

Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh melalui pengukuran atas:

- a. Variabel efektifitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian Indikator Kinerja Program pada level Unit Eselon I, dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada level K/L; dan
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana dan untuk umpan balik perbaikan penganggaran pada periode berikutnya. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian/ Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMARTDJA telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 yang dicabut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. Indikator ini memiliki periode perhitungan tahunan. Aplikasi ini dibangun dengan sistem *web-based* dan digunakan oleh seluruh kementerian/Lembaga pemerintahan Negara untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru (penyesuaian triwulan IV 2023) dengan perhitungan setiap triwulanan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan

Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 12. *Capaian Indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2025*

SS 5 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu													
IKU 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu													
Realisasi					Target		Realisasi		%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
-	-	-	-	92.16	88.5	88.5	94.36	106.62	106.62	2.39	88.5	106.62	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
-	-	-	-	92.84		88.5	-	-	-	-		-	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
-	-	-	-	94.5		88.5	-	-	-	-		-	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
-	-	86.14	92.88	94.72	88.5		0.00	0.00	-	0.00			

Pada triwulan I tahun 2025 ini terdapat 3 nilai tertinggi yang ada pada unsur pelayanan U1 (persyaratan layanan), U2 (kemudahan prosedur) dan U4 (kesesuaian biaya) dan U9 (kualitas isi/sarana) sedangkan untuk nilai terendah ada pada unsur pelayanan U5 (kesesuaian produk). Capaian nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencapai nilai 94,36, yang mana melebihi 106,62% dari target yang ditetapkan yakni 88,5. Nilai tersebut didapat dari 99 responden. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian triwulan I pada tahun 2025 ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,39%. Perbandingan dengan satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu mencapai 101,28% dari realisasi capaian PPN Prigi yaitu 93,17%.

Hal tersebut dapat dicapai dikarenakan oleh kualitas pelayanan di PPN Palabuhanratu yang telah prima dan optimal serta kesadaran dari pengguna jasa sendiri juga untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan sehingga waktu penyelesaian layanan dapat

diselesaikan secara efektif dan cenderung cepat.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2024 telah diperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui SP DIPA — 032.03.2.560393/2024 Tanggal 30 November 2023 dengan nilai sebesar Rp. 14.833.174.000,- (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
- c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Kelima kegiatan tersebut untuk mendukung sasaran strategis yang sudah ditetapkan dan pencapaian target IKU yang sudah ditetapkan. Secara rinci, anggaran tiap kegiatan yang diperoleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan anggaran yang terealisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Tahun 2025

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM EFISIENSI (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH EFISIENSI (Rp.)	REALISASI ANGGARAN(Rp.)	%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	656.261.000	132.307.000	14.662.000	11,08
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.052.000	1.605.000	0	00,00
2342	Dukungan Manajemen Internal LingkupDitjen Perikanan Tangkap	14.176.861.000	11.940.701.000	5.189.949.380	43,46
JUMLAH		Rp. 14.833.174.000,-	Rp. 12.074.613.000,-	Rp. 5.204.611.380,-	43,10

Dari tabel 14 dapat dijelaskan bahwa total realisasi anggaran triwulan I tahun 2025 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 5.204.611.380,- (lima miliar dua ratus empat enam ratus sebelas tiga ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 43,10% dari pagu sebesar Rp. 12.074.613.000 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas rupiah).

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diimplementasikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pelabuhan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dapat dilihat dari Dashboard Aplikasi Kinerjaku. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sebagaimana tercantum dalam dashboard aplikasi Kinerjaku Tahun 2025 yaitu 105,18%.

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Adapun rincian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu. Indikator ini belum bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan dari sewa lahan bangunan dan penggunaan coldstorage;
- 2) Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan pengoptimalan dalam pencatatan data hasil tangkapan dan juga adanya penambahan jumlah enumerator serta diberlakukannya sistem *shifting*;
- 3) Tingkat kinerja PPN Palabuhanratu. Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang dilakukan penginputan setiap harinya kedalam aplikasi PIPP. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena sudah dibentuk tim khusus PIPP disetiap sub koordinator sehingga masing-masing sub koordinator mempunyai tanggung jawab untuk memasukkan datanya sendiri dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang petugas PIPP untuk memasukkan data;
- 4) Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil

melebihi target yang telah ditetapkan karena dokumen bukti dukung penilaian pada SELARASKAN dapat terpenuhi dan dapat melakukan penginputan data secara tepat waktu, namun adanya penurunan pada triwulan II dikarenakan adanya penyesuaian dengan pembaruan aplikasi baru yaitu SELARASKAN V2;

- 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil mendapatkan nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan telah menindaklanjuti semua temuan yang ada sehingga realisasi mencapai 100%;
- 6) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang baik sehingga para pengguna jasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja secara optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, upaya – upaya yang perlu dilakukan di masa mendatang yaitu antara lain:

- a) Mempertahankan pelayanan jasa pelabuhan dan potensi PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu untuk meningkatkan realisasi PNBP sebagaimana yang telah ditargetkan;
- b) Monitoring secara lebih fokus kedepannya agar capaian indikator kinerja tersebut dapat meningkat bahkan memenuhi target yang telah ditetapkan;
- c) Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah sebagai berikut :
 - Setiap penanggungjawab kegiatan harus konsisten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - Perlu ditingkatkan kepedulian, evaluasi secara sistematis dalam rangka pencapaian indikator kinerja secara berkala.
- d) Mengoptimalkan sarana pelabuhan yang tersedia dan membangun sarana atau fasilitas pelabuhan untuk menunjang operasional, PNBP terutama PNBP Pasca produksi dan pelayanan pelabuhan kepada masyarakat perikanan;
- e) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen mutu bidang-bidang pelayanan pelabuhan,

dengan melakukan penerapan ISO 9001:2015 secara terus-menerus guna menjamin mutu pelayanan yang diberikan kepada *stakeholder*.

4.3 TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI SEBELUMNYA

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan IV tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan I tahun 2025 yaitu :

1. Melaksanakan rapat koordinasi terkait evaluasi kinerja operasional pelabuhan;
2. Melakukan pelaksanaan penguatan pengawasan wilayah bebas dari korupsi guna meningkatkan kinerja integritas dan memperkuat kesadaran pegawai dengan cara internalisasi di kalangan pegawai.

4.4 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu triwulan I tahun 2025, rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi dengan tim pengelola SELARASKAN V2 guna meningkatkan kualitas pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
2. Melakukan koordinasi dengan KPKNL secara berkala terkait dengan perubahan sewa lahan dan bangunan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Sarwono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Rp. Juta)	1050,14
2	Produktivitas Perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Ton)	6000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	35
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	55
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	195
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,50
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	71,50
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	88,50

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN(Rp.)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	646.261.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.052.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.176.861.000
Total Anggaran PPN Palabuhanratu Tahun 2025		Rp. 14.833.174.000,-

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Sarwono

